



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah:
Studi Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok
dan RPJMD Pemerintah Kota Depok
Periode 2021 – 2026**

Skripsi

Oleh

Raisha Zachra Tsabitah Nugraha

6071901053

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah:
Studi Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok
dan RPJMD Pemerintah Kota Depok
Periode 2021 - 2026**

Skripsi

Oleh

Raisha Zachra Tsabitah Nugraha

6071901053

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Raisha Zachra Tsabitah Nugraha
Nomor Pokok : 6071901053
Judul : Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah: Studi
Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok dan
RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021-2026

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 17 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

:  25072023

Sekretaris

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

: 

Anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.

:  25072023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Raisha Zachra Tsabitah Nugraha
Nomor Pokok Mahasiswa : 6071901053
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. (20150182) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Senin tanggal 17 July 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah: Studi Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 - 2026
Judul (Bahasa Inggris) : Political Accountability-Regional Head Administration: Accountability Study of Depok Mayor's Political Branding and Depok City Government RPJMD 2021 - 2026 Period

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia) -

Judul (Bahasa Inggris) -

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) : Kalau ada typo, editing

3. Perbaikan di Bab 1 Pertanyaan penelitian, tujuan, kegunaan diselaraskan

4. Perbaikan di Bab 2 Menyesuaikan

5. Perbaikan di Bab 3 Teknik analisis data dipertegas, keterpercayaan data

6. Perbaikan di Bab 4 Kalau masih ada data yang bisa untuk melengkapi

7. Perbaikan di Bab 5 Kesimpulan / Saran - lebih spesifik lagi dan terkait saran dan kesimpulan

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 17 July 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_iap.fisip@unpar.ac.id
7/17/2023 16:00:52

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji (Pembimbing),

trisosakti@unpar.ac.id
7/17/2023 15:47:55

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

prasetyo@unpar.ac.id
7/17/2023 16:27:30

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Penguji,

kristian.widya@unpar.ac.id
7/17/2023 16:27:30

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raisha Zachra Tsabitah N
NPM : 6071901053
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah:
Studi Akuntabilitas Branding Politik Walikota
Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok
Periode 2021 - 2026

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juni 2023



Raisha Zachra Tsabitah N

Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah: Studi Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021-2026

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jabar.inews.id Internet Source	1%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
3	Silvi Luftiah Hasanah. "KETERBACAAN VISUAL MEDIA BUKU CERITA FABEL "KURA-KURA SANG JUARA"", Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI), 2021 Publication	<1%
4	www.researchgate.net Internet Source	<1%
5	www.scribd.com Internet Source	<1%
6	bappeda.jogjaprov.go.id Internet Source	<1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

ABSTRAK

Nama : Raisha Zachra Tsabitah Nugraha

NPM : 6071901053

Judul : Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah : Studi
Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok dan
RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui akuntabilitas politik-administrasi kepala daerah yang terwujud dalam Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026. Proses administrasi publik yang ideal di tingkat daerah diwujudkan dengan keselarasan antara aspek politik dan aspek administrasi. Meskipun demikian, terdapat indikasi masalah berupa ketidaksiharasan antara salah satu bentuk branding politik Walikota Depok dengan realita pembangunan yang menimbulkan polemik diantara politisi dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis konten. Analisis data dilakukan pada 11 data terkait branding politik Walikota Depok dan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 - 2026. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten tematik dengan bantuan perangkat lunak Atlas.ti yang akan memberikan hasil akhir visualisasi jaringan untuk mengetahui isu apa saja yang selaras dan tidak selaras antara branding politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik-administrasi Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026 dapat dikatakan akuntabel. Hal ini dipahami dari temuan bahwa berbagai isu pembangunan pada RPJMD melampaui isu – isu pembangunan yang ada dalam branding politik. Janji politik Walikota Depok melalui branding politik yang diberikan tertuang sepenuhnya pada RPJMD Pemerintah Kota Depok. Saran yang dirumuskan peneliti dari penelitian ini yaitu masyarakat perlu lebih bijak dalam memberikan kritik maupun saran terhadap kinerja pemerintah daerah. Saran berikutnya yaitu kepala daerah terutama Walikota Depok perlu menjelaskan bahwa branding politik yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dalam administratif. Saran terakhir untuk penelitian selanjutnya diperlukan upaya untuk melihat akuntabilitas RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026 dan implementasi dari janji politik yang terangkum dalam RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026.

Kata Kunci : Akuntabilitas Politik-Administrasi, Branding Politik, RPJMD

ABSTRACT

Name : Raisha Zachra Tsabitah Nugraha

NPM : 6071901053

Title : *Political Accountability-Regional Head Administration :
Accountability Study of Depok Mayor's Political Branding and
Depok City Government RPJMD 2021 – 2026 Period*

This research is directed to find out at the political-administrative accountability of the regional head which is realized in the Depok Mayor's Political Branding Accountability and the Depok City Government RPJMD for the 2021 – 2026 Period. The Ideal public administration process at the regional level is realized by the harmony between political aspects and administrative aspects. However, there are indications of problems in the form of misalignment between one form of political branding of the Mayor Depok ad the reality of development politicians and the public.

The research uses a qualitative method with the type of content analysis. Data analysis was conducted on 11 data related to the political branding of the Mayor of Depok and the Depok City Government RPJMD document. The data analysis technique used is thematic content analysis with the help of Atlas.ti software which will provide the final result of network visualization to find out what issues are aligned and not aligned between the political branding of the Mayor of Depok and the Depok City Government RPJMD for the 2021 – 2026 Period.

The results showed that the political-administrative relationship between the Depok Mayor's Political Branding and the Depok City Government RPJMD for the 2021 – 2026 Period can be said to be accountable. This is understood from the findings that various development issues in the RPJMD exceed the development issues in political branding. The political promises of the Mayor of Depok through political branding are fully contained in the Depok City Government RPJMD for the 2021 – 2026 Period. The suggestions formulated by researchers from this research are that people need to be wiser in providing criticism and suggestions for the performance of local governments. The next suggestion is that the regional head, especially the Mayor of Depok, needs to explain that the political branding carried out can be accounted for in the administration. The last suggestion for further research is that efforts are needed to look at the accountability of the Depok City Government RPJMD for the 2021-2026 Period and the implementation of political promises summarized in the Depok City Government RPJMD for the 2021-2026 Period.

Keywords : Political-Administrative Accountability, Political Branding, RPJMD

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah : Studi Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026*”. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Mama, Papa, Ade Rayzel dan Bunda serta Keluarga Besar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil serta doa dan seluruh bentuk dukungan lainnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan dan juga selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan serta masukkan juga kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
3. Diri peneliti sendiri yang telah berjuang menghadapi segala rintangan selama menyusun skripsi dan mampu bertahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Segenap dosen program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Afiona Eng selaku saksi hidup perjalanan kuliah sehari - hari peneliti yang selalu ada 24/7 mendengarkan keluh kesah yang tidak berujung dan selalu

memberikan support yang sangat memotivasi peneliti untuk tidak menyerah dan terus maju ke arah yang lebih baik.

6. Atmos kesayangan yang selalu setia menemani peneliti kemanapun dan kapanpun tanpa pernah merepotkan disituasi yang tidak terduga.
7. Teman - teman seperjuangan dan sepebimbingan peneliti Venna Indika, Azriel Hasbi, Theresia Erinata, Maria Stefanie, Tamara Nabila, Eryca Dea, Satria Putra dan Bernadeth Getrudis.
8. Seluruh teman - teman Administrasi Publik angkatan 2019 yang selalu menjadi bagian dari perjalanan peneliti selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
KERANGKA TEORI	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Akuntabilitas Politik-Administrasi	16
2.2.1. Akuntabilitas Politik-Administrasi di Tingkat Daerah	20
2.3. Branding Politik Kepala Daerah	21
2.4. Perencanaan Strategis di Tingkat Daerah	24
2.5. Akuntabilitas Politik-Administrasi berdasarkan Kesesuaian Branding Politik dan RPJMD	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1. Tipe Penelitian	29
3.2. Peran Peneliti	30
3.3. Sumber Data	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data	31

3.5. Analisis Data	34
3.6. Keabsahan Data	36
BAB IV	37
PROFIL PENELITIAN	37
4.1. Walikota Depok	37
4.2. Wakil Walikota Depok	39
4.3. Branding Politik Walikota dan Wakil Walikota Depok	40
BAB V	42
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	42
5.1. Perbandingan Tema Isu Pembangunan dalam Branding Politik	42
5.1.1. Tema – Tema Isu Pembangunan dalam Branding Politik	42
5.1.2. Tema – Tema Isu Pembangunan dalam RPJMD	44
5.1.3. Akuntabilitas Tema Isu Pembangunan dalam Branding Politik dan RPJMD	46
5.2. Branding Politik dan RPJMD berdasarkan Bidang Prioritas Pembangunan	53
5.2.1. Bidang Prioritas Pembangunan dalam Tema Isu Pembangunan Branding Politik	54
5.2.2. Bidang Prioritas Pembangunan dalam Tema Isu Pembangunan RPJMD	57
5.2.3. Hubungan Politik-Administrasi Branding Politik dan RPJMD berdasarkan Bidang Prioritas Pembangunan	59
BAB VI	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
6.1. Kesimpulan	63
6.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tema Isu Pembangunan dalam Branding Politik.....	47
Gambar 1.1 Bidang Prioritas Pembangunan Pelayanan Publik.....	47
Gambar 1.2 Bidang Prioritas Pembangunan Pendidikan.....	48
Gambar 1.3 Bidang Prioritas Pembangunan Permukiman.....	48
Gambar 1.4 Bidang Prioritas Pembangunan Sosial dan Budaya.....	48
Gambar 1.5 Bidang Prioritas Pembangunan Lingkungan.....	49
Gambar 1.6 Bidang Prioritas Pembangunan Ekonomi.....	49
Gambar 1.7 Bidang Prioritas Pembangunan Infrastruktur.....	49
Gambar 2. Penyederhanaan Tema Isu Pembangunan dalam Branding Politik.....	50
Gambar 3. Tema Isu Pembangunan dalam RPJMD.....	50
Gambar 3.1. Bidang Prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup – Permukiman.....	51
Gambar 3.2. Bidang Prioritas Pembangunan SDM – Ekonomi.....	51
Gambar 3.3. Bidang Prioritas Pembangunan Sosial – Budaya.....	51
Gambar 3.4. Bidang Prioritas Pembangunan Infrastruktur – Pelayanan Publik.....	51
Gambar 4. Penyederhanaan Tema Isu Pembangunan RPJMD.....	52
Gambar 5. Akuntabilitas Branding Politik dan RPJMD.....	53
Gambar 6. Hubungan Politik-Administrasi SDM – Ekonomi.....	61
Gambar 7. Hubungan Politik-Administrasi Lingkungan Hidup – Permukiman.....	61

Gambar 8. Hubungan Politik-Administrasi Infrastruktur – Pelayanan Publik.....	62
Gambar 9. Hubungan Politik-Administrasi Sosial – Budaya.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu yang penting dalam menjamin berbagai kebijakan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rosenbloom berpendapat bahwa Administrasi Publik merupakan pengaplikasian teori dengan proses manajerial, hukum serta politik guna memenuhi mandat pemerintah eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam rangka menyediakan fungsi - fungsi dan pelayanan bagi masyarakat secara keseluruhan maupun pada beberapa segmen masyarakat¹. Oleh sebab itu administrasi publik berperan besar dalam sistem birokrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam melayani rakyat dengan sebaik - baiknya.

Secara keilmuan, Administrasi Publik sudah melewati beberapa perubahan. Berawal dari gagasan yang dikemukakan oleh Wilson dalam esai pertamanya "*The Study of Administration*" yang sangat terkenal pada tahun 1887 menimbulkan perdebatan diantara para ahli mengenai Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik. Gagasan tersebut yakni Wilson memperkenalkan Ilmu baru yang disebut dengan Administrasi, pokok bahasan Ilmu Administrasi berkaitan dengan bisnis. Dalam hal ini, bisnis yang dimaksud adalah ilmu administrasi harus dipisahkan dari kepentingan politik demi mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan prinsip profesional, netralitas dan sesuai dengan

¹ S. Marume, 'Meaning of Public Administration,' *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 4 (2016): 18.

tujuan yang ditetapkan². Dari sini lahirlah istilah Dikotomi Politik-Administrasi sebagai salah satu dari lima serangkaian paradigma administrasi publik yang diuraikan oleh Nicholas Henry.

Fokus paradigma Dikotomi Politik-Administrasi yang diuraikan oleh Nicholas Henry terkait dengan fungsi pokok aspek politik dan aspek administrasi yang berbeda dalam pemerintahan. Pada aspek politik fungsi pokok dalam pemerintahan hanya meliputi permasalahan politik dan kebijaksanaan, sedangkan aspek administrasi hanya meliputi permasalahan organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam sistem birokrasi pemerintah³. Selain pemisahan fungsi pokok dalam pemerintahan, lokus kedua aspek tersebut juga dipisahkan. Lokus politik meliputi badan – badan legislatif dan yudikatif dengan tugas pokok menghasilkan kebijaksanaan – kebijaksanaan atau keinginan – keinginan negara, sedangkan lokus administrasi meliputi badan – badan eksekutif dengan tugas pokok yang bersinggungan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan – kebijaksanaan yang dihasilkan oleh aspek politik⁴.

Mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern, paradigma yang diuraikan oleh Nicholas Henry juga berubah. Dimana saat ini paradigma administrasi publik dikenal dengan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – saat ini) yang diartikan sebagai kebangkitan hubungan yang baru antara politik dan administrasi yang sebelumnya dipisahkan

² J. Fitriyono, 'Politik dan Administrasi : Dilema konsep Wildrow Wilson.' https://www.researchgate.net/publication/362862559_Politik_dan_Administrasi_Dilema_konsep_Woodrow_Wilson (-.08.2020)

³ A, Anwaruddin. 'PASANG SURUT PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK,' Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 1(2004): 6.

⁴ *Ibid*, 6.

berubah menjadi kontinum politik-administrasi yang mana bukan lagi merupakan bidang terpisah melainkan saling berdampingan dan melengkapi yang mampu dimengerti, masuk akal serta mampu diterapkan.⁵ Dalam paradigma ini dijelaskan bahwa para ahli administrasi publik semakin peduli dengan bidang – bidang yang terkait dengan ilmu kebijakan, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan publik beserta analisisnya dan pengukuran hasil kebijakan⁶. Lokus dari administrasi publik yakni masalah - masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya yaitu teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik dan ekonomi politik⁷.

Tata kelola pemerintahan yang ideal ditunjukkan dengan hubungan politik-administrasi yang selaras, dimana aspek politik dan aspek administrasi berjalan beriringan. Jika salah satu aspek tidak dihadirkan maka akan berimbas pada tingkat kestabilan pemerintahan yang berat sebelah, artinya pemerintah tidak bisa memaksimalkan fungsi – fungsi dan tugas pokoknya dalam mengelola sebuah negara yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah mengupayakan keselarasan antara aspek politik dan aspek administrasi tidak hanya di pemerintahan pusat saja namun juga di pemerintahan daerah. Diberikannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menerapkan paradigma kelima yang mana menginginkan administrasi berdampingan dengan politik.

⁵ N. Henry, *Public Administration and Public Affairs* (New York : Routledge,2017), 45

⁶ N, Henry. 'Paradigms of Public Administration,' *Public Administration Review*, 35 (1975): 383

⁷ F. Website, 'Paradigma Administrasi Administrasi Publik.'

[https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/paradigma-administrasi-administrasi-publik/#:~:text=Sejak%201970%2C%20administrasi%20publik%20diakui,kebijakan%20publik%20dan%20political%2Deconomy.\(01.12.2021\)](https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/paradigma-administrasi-administrasi-publik/#:~:text=Sejak%201970%2C%20administrasi%20publik%20diakui,kebijakan%20publik%20dan%20political%2Deconomy.(01.12.2021))

Kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal berpolitik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administratif. Seperti halnya kegiatan Pilkada yang merupakan perwujudan dari hubungan politik-administrasi, dimana proses politik dalam kegiatan kampanye akan ditindaklanjuti pada proses administrasi dan mencapai keselarasan antara dialog politik dan tindakan administrasi. Namun, realitanya masih terjadi ketidaksielarasan politik-administrasi yang dilakukan oleh pejabat politik dimana janji – janji politiknya tidak diimplementasikan secara administrasi sehingga tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang ideal. Seperti halnya yang dilakukan oleh Walikota Depok dengan mengubah lirik hymne dan mars Kota Depok yang dalam makna lirinya tidak sesuai dengan realita pembangunan yang ada di Kota Depok.

Beberapa tahun belakangan Kota Depok menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia dan menjadi topik perbincangan teratas pada platform media sosial seperti twitter dan instagram. Hal tersebut terjadi karena berita - berita terbaru terkait kota Depok yang dinilai unik dan tidak biasa daripada kota - kota lainnya di Indonesia. Seringkali berita - berita tersebut memicu protes dari masyarakat dan politisi di Kota Depok terkait dengan kebijakan maupun program - program yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Selain itu nama Walikota Depok yakni Mohammad Idris ikut terseret menjadi perbincangan masyarakat karena beberapa tindakannya yang dianggap kontroversial, salah satunya adalah baru - baru ini diberitakan bahwa Walikota Depok mengubah hymne dan mars Kota Depok yang merupakan hasil dari renungan Idris sendiri.

Dilansir dari [detiknews.com](https://www.detiknews.com) pernyataan Walikota Depok mengungkap alasan dibalik pembuatan hymne juga mars Depok yakni sebagai sebuah asa juga cita - citanya terhadap Kota Depok yang penuh dengan sejarah dan dianggap sebagai penyangga ibu kota dan etalase Jawa Barat yang dimana hal ini harus disesuaikan pula dari sisi Kota Depok seperti udara yang bagus, lingkungan yang bersih juga nyaman serta keluarga yang harmonis⁸. Tentunya hal ini mendapatkan respon yang cenderung negatif dan menimbulkan polemik di antara para politisi juga masyarakat yang beranggapan perubahan hymne dan mars ini tidaklah penting untuk diutamakan dan dilakukan sebab masih banyak permasalahan lainnya di Kota Depok yang membutuhkan perhatian lebih dari Walikota untuk segera diperbaiki.

Politisi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Depok Ikhrany Hilman yang merupakan Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan ikut bersuara dengan protes bahwa lirik dalam hymne yang terbaru tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang ada di Kota Depok, bahkan Ikhrany beranggapan bahwa selama 20 tahun terakhir kemana arah pembangunan Kota Depok masih belum jelas dan justru tampak semakin awut - awutan⁹. Hymne dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk branding politik Walikota Depok Mohammad Idris, yang mana mewakili cita - cita juga harapannya selama memimpin Kota Depok ke arah pembangunan yang lebih baik di masa kepemimpinannya. Seluruh strategi, langkah - langkah maupun visi misi Mohammad Idris sebagai Walikota telah tercantum dalam

⁸ D. Rahmawati, 'Walkot Idris Ungkap Alasan Ciptakan Mars dan Himne Depok.' <https://news.detik.com/berita/d-6298824/walkot-idris-ungkap-alasan-ciptakan-mars-dan-himne-depok> (18.09.2022)

⁹ Dicky. 'DPRD Kritik Hymne dan Mars Terbaru Kota Depok, Tak Sesuai Kenyataan!.' <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dicky-12/dprd-kritik-hymne-dan-mars-terbaru-kota-depok-tak-sesuai-kenyataan?page=all> (09.09.2022)

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Depok dalam bekerja selama jangka periode kepemimpinannya.

Berangkat dari pernyataan mengenai perubahan lirik hymne serta mars Kota Depok dan komentar dari Politisi Fraksi PDIP, sebenarnya sah - sah saja untuk dilakukan oleh seorang Walikota di kala memimpin sebuah daerah selama masih dalam konteks normal seperti untuk mempertahankan citra publiknya yang sudah dikenal masyarakat luas ataupun sebagai ungkapan harapan bagi kemajuan daerahnya yang selaras dengan harapan masyarakat. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah tidak menghambat pelaksanaan operasional administrasi yang telah disusun dan dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Menjadi permasalahan apabila aspek politik dan aspek administrasi tidak menginterpretasikan keselarasan. Berdasarkan paradigma kelima yang dikenal dengan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, menggagaskan bahwasanya ilmu politik dan ilmu administrasi di zaman sekarang sudah maju dengan mengikuti kebutuhan dan kepentingan publik yang semakin beragam membuat hubungan politik dan administrasi saling berdampingan juga saling melengkapi ruang kosong di antara keduanya dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam melayani masyarakat. Seperti halnya masyarakat yang ingin merasakan perubahan daerahnya yang berdampak pada nasib masyarakat itu sendiri. Maka dengan memanfaatkan momen Pilkada yang diadakan lima tahun sekali masyarakat berhak untuk memilih kandidat kepala daerah yang dirasa mampu

membawa perubahan besar dengan mengetahui janji - janji juga program unggulan yang telah diperkenalkan untuk menarik suara terbanyak masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan antara lirik hymne dan mars serta realita pembangunan di Kota Depok, diperlukan upaya untuk meneliti akuntabilitas politik-administrasi kepala daerah Kota Depok. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengetahui keselarasan antara branding politik dan perencanaan strategis melalui keselarasan isu - isu pembangunan yang menjadi fokus Walikota Depok saat berkampanye hingga menjabat, serta isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Depok yang menjadi fokus seorang kepala daerah untuk memimpin pembangunan kota yang lebih baik dari pada kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, juga sebagai bukti nyata secara verbal bahwa branding politik yang sudah diperkenalkan dan dijanjikan kepada masyarakat luas terutama yang memberikan dukungan dan suaranya bahwasanya diwujudkan secara administratif dalam dokumen daerah.

Dengan mengetahui adanya keselarasan yang ada pada branding politik dan dirumuskan dalam dokumen RPJMD yang telah disahkan setelah terpilihnya kandidat kepala daerah, maka dapat dilihat secara garis besar apa yang akan menjadi fokus pemerintah dibawah kepemimpinan Idris selaku Walikota kedepannya. Hal tersebut dapat menggambarkan perubahan - perubahan apa saja yang berubah terhadap isu - isu pembangunan daerah yang telah menjadi fokus sejak awal berkampanye. Nantinya hasil dari temuan penelitian ini terkait dengan isu permasalahan apa saja yang muncul dalam branding politik dan dokumen RPJMD selama kegiatan olah data dan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini diajukan untuk mengetahui Akuntabilitas antara Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 - 2026 dari sisi keselarasan isu - isu pembangunan yang ditonjolkan pada saat kampanye politik maupun setelah menjabat dengan dokumen daerah yakni RPJMD Kota Depok dengan fokus pada bagian Bab 4, 5 dan 6. Branding politik yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk branding politik yang dilakukan oleh Walikota Depok sejak berkampanye hingga menjadi Walikota Depok Periode 2021 - 2026.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Bagaimana Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah berdasarkan keselarasan isu pembangunan Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelesan sebelumnya mengenai rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yakni mengetahui Akuntabilitas Politik-Administrasi Kepala Daerah berdasarkan keselarasan isu pembangunan Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan referensi terkait akuntabilitas politik-administrasi

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pemerintah daerah terkait dengan tata Kelola administrasi dan politik di pemerintah daerah yang sesuai dengan aspek akuntabilitas politik-administrasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas politik-administrasi bagi para pejabat politik dan administrative pemerintah daerah Kota Depok dalam membangun citra public yang selaras dengan visi misi maupun rencana – rencana pemerintah daerah yang akan berdampak pada pembangunan Kota Depok kedepannya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi akuntabilitas politik-administrasi bagi para pejabat politik dan administratif pemerintah daerah lainnya untuk menyelaraskan citra publik yang selaras dengan kegiatan administrative yang telah disusun dalam dokumen daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menerapkan sistematika penulisan yang mencakup :

- a. BAB 1 Pendahuluan

Mencakup latar belakang penelitian serta penjelasan terkait dengan indikasi masalah atau gap penelitian, rumusan masalah penelitian , tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis juga dan sistematika penulisan.

b. BAB 2 Kerangka Teori

Mencakup pembahasan mengenai penelitian terdahulu serta teori - teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian dari rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas politik-administrasi, akuntabilitas politik-administrasi di tingkat daerah, branding politik kepala daerah, perencanaan strategis di tingkat daerah dan akuntabilitas politik-administrasi berdasarkan kesesuaian branding politik dan RPJMD.

c. BAB 3 Metode Penelitian

Menjelaskan langkah - langkah penelitian mengenai metode dan teknik yang diaplikasikan dalam pengolahan data juga keabsahan data yang diperoleh.

d. BAB 4 Profil Penelitian

Menjelaskan latar belakang, pendidikan juga karier dari Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok beserta bentuk branding politik selama berkampanye di Pilkada Kota Depok 2020.

e. BAB 5 Hasil Temuan dan Pembahasan

Menguraikan hasil temuan – temuan peneliti setelah dilakukan analisis dan olah data yang dapat menjawab pertanyaan awal penelitian.

f. BAB 6 Kesimpulan dan Saran

Mendesripsikan hasil temuan penelitian yang telah dianalisis sehingga menjadi kesimpulan serta mengusulkan saran.